

## KONSEPSI TOTAL QUALITY MANAJEMEN DAN APLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN

Wannen Pakpahan  
Pengawas SMK di Jakarta

### Abstrak:

*Era globalisasi dan pasar bebas dimana manusia di hadapkan pada perubahan-perubahan cepat dan tidak menentu karena imbas dominasi Negara tertentu. Setiap lembaga atau organisasi yang melakukan proses produksi pasti memiliki standar mutu atau kualitas produk. Tidak terkecuali organisasi pendidikan, sebagai sebuah lembaga yang melakukan produksi dalam bidang jasa maka pasti memiliki suatu standar yang baku tentang pengawasan tingkat kualitas produksinya.*

Kata Kunci: TQM dan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai aset dasar dan potensial bagi sebuah bangsa adalah merupakan sebuah keniscayaan untuk di jaga. Sebagai sebuah bangsa yang sedang berkembang bangsa Indonesia seharusnya mampu membuat pendidikan sebagai bekal dalam memajukan kehidupan bangsa dalam meraih cita-cita kemerdekaan yaitu kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini juga secara eksplisit terkandung dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea ke-IV dan juga pada Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan ayat (3).

Sebagaimana tercantun pada pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.[1] Dari amanah yang diberikan UUD '45 pemerintah telah membuat suatu sistem pendidikan nasional dengan menerbitkan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*SISDIKNAS*).

Sistem Pendidikan Nasional (*SISDIKNAS*) diharapkan mampu menjadikan perubahan terhadap perbaikan mutu pendidikan nasional yang selanjutnya diharapkan mutu sumber daya manusia (*Human Resourment*) bangsa Indonesia meningkat. Peningkatan sumber daya manusia adalah kunci dalam melakukan hubungan internasional atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi. Era globalisasi adalah era persaingan antar negara dalam memperebutkan dominasi global.

Era globalisasi dan pasar bebas dimana manusia di hadapkan pada perubahan-perubahan cepat dan tidak menentu karena imbas dominasi Negara tertentu. Aspek dan pra syarat dari sebuah Negara mampu menjadi penentu dominasi global adalah kualitas *insan cita* (human quality) atau sumber daya manusia yang tinggi. Dan, satu-satunya pabrik yang mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tinggi adalah lembaga pendidikan.

Tuntutan akan sumber daya manusia yang tinggi adalah salah satu dari tuntutan dunia pendidikan, karena kualitas terdidik akan tergali dan dapat di asah dengan baik dengan proses pendidikan yang baik pula. Asumsi yang terbangun pada pakar pendidikan di Indonesia saat ini adalah bahwa pendidikan yang dilaksanakan bangsa Indonesia belum mampu menjawab permintaan yang besar terhadap mutu SDM. Bahkan Darmaningtyas dengan tegas mengatakan bahwa “Intitusi pendidikan itu tidak cerdas dan tidak kritis, terbukti mereka tidak punya kepekaan terhadap masalah kritis”[2].

Asumsi-asumsi yang dinyatakan tentang buruknya kondisi mutu pendidikan di Indonesia harusnya dijawab dengan perbaikan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan baik yang ada di bawah koordinasi departemen pendidikan nasional maupun departemen agama. Pendidikan adalah suatu proses dan sistem yang bermuara pada terwujudnya pencapaian kualitas SDM yang menjadikan kondisi sosial kemasyarakatan menjadi masyarakat madani (*civil society*). Pentingnya peranan pendidikan dalam merubah seorang peserta didik menjadi berbudi, berpengetahuan tinggi dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan, mengisyaratkan bahwa pengelolaan pendidikan haruslah maksimal dan professional.

Dalam Undang – Undang RI nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, secara langsung maupun tidak, telah membawa dampak yang cukup besar dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan. Pemberian

otonomi pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan yang sesuai karakteristik daerah. Realisasi dari otonomi pendidikan ini adalah munculnya program *school based management* (manajemen berbasis sekolah) yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk melakukan modifikasi kurikulum dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Selain pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pemerintah juga mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) yang di ikuti dengan di bentuknya BSNP yang menjadi polisi mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan semakin jelasnya landasan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah program desentralisasi kebijakan pendidikan mulai dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya sekolah atau lembaga pendidikan diharuskan mampu merumuskan kurikulum dan memiliki penjaminan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pemerintah dan masyarakat.

## B. Kajian Mutu Dalam Pendidikan

### 1. Pengertian Mutu

Dalam pengertian umum mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam definisi yang lain kata mutu berasal dari bahasa Inggris yaitu *Quality* yang berarti kualitas.[3] Dari pendapat tersebut diperoleh pengertian bahwa mutu adalah tingkat dari baik-buruknya suatu produksi barang dan atau jasa. Sehingga konsumen dapat dinilai tingkat kepuasannya dari hasil produksi tersebut.

Dalam pengertian yang lain definisi mutu yang praktis adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah[4].

Setiap lembaga atau organisasi yang melakukan proses produksi pasti memiliki standar mutu atau kualitas produk. Tidak terkecuali organisasi pendidikan, sebagai sebuah lembaga yang melakukan produksi dalam bidang jasa maka pasti memiliki suatu standar yang baku tentang pengawasan tingkat kualitas produksinya. Namun penerapan dari standar mutu dalam dunia pendidikan sedikit berbeda dengan penerapan yang dilakukan dalam organisasi perusahaan ekonomi yang berorientasi pada profit.

Standar manajemen mutu pertama kali diperkenalkan konsepnya oleh Dr. W. Edward Deming yang di akui sebagai “Bapak Mutu”[5].Dr. W. Edward Deming meraih gelar Ph.D dalam matematika dan fisika dari Universitas Yale pada tahun 1920-an. Beliau di akui sebagai “Bapak Mutu” karena menerapkan standar kontrol mutu pada pabrik-pabrik perlengkapan perang milik pemerintah Amerika.

Setelah perang Dunia Ke-II berakhir Dr. W. Edward Deming mendirikan perusahaan konsultan yang salah satu kliennya adalah Departemen Luar Negeri Jepang. Dr. W. Edward Deming dengan metode standar control mutunya dianggap berhasil dalam mengangkat ekonomi negara Jepang.

Pada dasarnya Dr. W. Edward Deming cenderung menempatkan mutu dalam artian yang lebih manusiawi. Ketika pekerja perusahaan berkomitmen pada pekerjaan untuk dilaksanakan dengan baik dan memiliki proses manajerial yang kuat untuk bertindak, maka mutu pun akan mengalir dengan sendirinya[6].

Inti dari aspek metodologi pendekatan manajemen mutu Deming adalah menggunakan teknik statistic sederhana pada *output* program perbaikan yang berkelanjutan atau terus menerus. Sehingga dari hasil evaluasi dengan metode statistic seorang manajer dapat mengidentifikasi terhadap masalah yang sedang dan telah dihadapi, termasuk mencari akar permasalahannya dan tehnik penanganan yang paling tepat terhadap masalah tersebut secara berkelanjutan.

Selain Dr. W. Edward Deming salah satu tokoh manajemen mutu yang juga di akui sebagai “Bapak Mutu” adalah Dr. Joseph M. Juran. Dr. Joseph M. Juran memiliki latar pendidikan di bidang Hukum dan Tekhnik. Beliau juga ahli dalam bidang statistic sebagaimana Dr. Deming.

Pandangan Dr. Juran tentang Mutu merefleksikan pendekatan rasional yang berdasarkan pada fakta terhadap organisasi bisnis dan sangat menekankan pada pentingnya proses perencanaan dan control Mutu [7]. Dr. Juran menyebut mutu sebagai “tepat untuk pakai” dasar dari pandangan ini secara filosofis adalah kepercayaan dan keyakinan organisasi dalam terhadap produktifitas individual. Artinya mutu dapat dijamin dengan dengan cara setiap individu organisasi memiliki sikap professional untuk menjalankan pekerjaan dengan tepat dan menempati posisi yang tepat pula. Dengan perangkat yang tepat pekerja akan memproduksi barang dan jasa yang secara konsisten sesuai dengan harapan kostumer.

Dari beberapa definisi tentang Mutu diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa mutu adalah standar control terhadap hasil produksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan biaya yang relative rendah.

## 2. Pengertian Mutu Dalam Pendidikan

Dunia pendidikan sebagai salah satu asset penting dalam *human investment* sudah menjadi suatu kewajiban apabila menjadi prioritas dalam penanganannya oleh pemerintah. Melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di harapkan dunia pendidikan Indonesia akan bangkit. Kebangkitan dan keberhasilan dunia pendidikan akan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari pembenahan perundang-undangan pendidikan dengan disahkannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, terakhir pembenahan kurikulum yaitu KTSP ( Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ) bagi sekolah dasar dan menengah atau yang sederajat dan sertifikasi bagi pendidik. Kebijakan – kebijakan pemerintah tentang perbaikan kondisi pendidikan adalah harapan besar yang datang dari masyarakat.

Harapan besar masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu memperbaiki kondisi mutu pendidikan di Indonesia. Gambaran umum tentang rendahnya mutu pendidikan secara nasional telah menggejala sejak permulaan tahun 1970-an setelah didahului oleh serangkaian studi yang dilakukan oleh para ahli dibidang pendidikan. Moegiadi dalam salah satu studinya menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh lebarnya disparitas mutu hasil belajar siswa dari berbagai lingkungan sosio-geografi. Mastuhu dalam studinya mengemukakan salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari angka kelulusan Kohort. Dari 100% seluruh anak SD yang berhasil lulus hanya 64,4%; dari jumlah tersebut yang meneruskan ke jenjang SLTP sebesar 41,3%; yang berhasil lulus sebesar 30,8%; yang diterima pada jenjang SMA sebesar 24%; dari jumlah ini yang dapat diperguruan tinggi tahun akademik 1997/1998 sampai dengan 1999/2000 hanya sebesar 11,6%. Sedangkan menurut data Human Develovement Index (HDI) sebagaimana dikutip oleh BAPPENAS (1995) mengumumkan bahwa mutu sumber daya manusia Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 174 negara, dengan indeks sebesar 0,641, Korea Selatan ke-29 dengan indeks 0,886 sedangkan Filipina ke-95 dengan indeks sebesar 0,657.

Untuk itu perlu dicari akar masalah utama mengapa pendidikan di Indonesia bermutu rendah walaupun berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Menurut Eman Suparman *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.

*Kedua*, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

*Ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Dari berbagai diskursus tentang rendahnya mutu pendidikan tersebut banyak praktisi yang berusaha melakukan reformulasi terhadap perbaikan supra-sistem kependidikan di Indonesia. Salah satu reformulasi tersebut adalah pengadopsian teori manajemen mutu yang

sebelumnya berhasil diterapkan pada organisasi bisnis untuk di aplikasikan pada organisasi pendidikan.

Dalam dunia pendidikan manajemen mutu biasa disebut dengan istilah MMT ( Manajemen Mutu Terpadu ). MMT adalah adalah sebuah konsep yang di turunkan dari manajemen mutu,. Definisi MMT ( TQM ), seperti definisi-definisi lainnya berbeda, tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Akar dari MMT ialah QC ( Quality Control ), kemudian berkembang menjadi QA ( Quality Assurance ) dan akhirnya menjadi MMT.[8] Jadi MMT adalah penyempurnaan dari konsep – konsep manajemen yang sebelumnya telah dipakai. Bahkan lebih jauh konsep awal dari TQM telah di adopsi sedemikian rupa sehingga dapat di pakai pada organisasi atau lembaga pendidikan.

### 3. TQM (Management Mutu Terpadu) Dalam Pendidikan

Di negara-negara yang mapan dimana pengaruh globalisasi sangat kuat aspek pendidikan tidak lagi menjadi persoalan besar, bahkan institusi pendidikan tinggi mulai menjadi lembaga internasional dengan segmentasi konsumen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam konteks seperti itu, di mana selain adanya standar bagi penyelenggaraan *international education*, dalam rangka perbaikan mutu, manajemen mutu sangat berorientasi pada konsumen baik di pasar lokal maupun dunia yang terdesentralisir dan sangat kompetitif.

Perbaikan mutu yang berorientasi pada konsumen sangat penting demi kelangsungan universitas tersebut dalam kondisi yang dinamis. Selain itu, kebijakan mengenai strategi manajemen mutu dari suatu universitas dapat merupakan cermin bagi pihak luar terutama mahasiswa dan calon mahasiswa bahwa mutu pendidikan merupakan prioritas utama dari universitas.

Dengan mencermati kondisi dan situasi yang ada di Indonesia, tampaknya konteks perguruan tinggi yang berbeda menyebabkan pusat perhatian mengenai mutu juga berbeda. Perhatian utama tentang mutu masih berkisar sebatas bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu. Pada kenyataannya, ada tiga faktor yang dapat dilihat sebagai pendorong perlunya memperluas ruang lingkup perhatian dalam rangka peningkatan mutu. Ketiga faktor tersebut adalah *pertama* rendahnya kualitas lulusan di lembaga perguruan tinggi, *kedua* adalah *issue value for money* yaitu fakta tentang krisis ekonomi dan *ketiga* adalah yang dapat dipandang sebagai pendorong bagi penyelenggaraan sistim *quality assurance* di pendidikan tinggi yaitu sejalan dengan makin meningkatnya tuntutan tentang akuntabilitas dari perguruan tinggi

terutama menjelang era otonomi yang diawali dengan perubahan menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dari 4 universitas (IU, ITB, IPB dan UGM). Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan monitoring terhadap lembag-lembaga tersebut.

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa waktu rata-rata mahasiswa menyelesaikan studinya masih terlalu panjang dibandingkan dengan waktu acara program studi. Sebagai contoh untuk tahun 1999/2000, hanya 47% mahasiswa program DIII dan 51% mahasiswa program S1 yang dapat menyelesaikan studinya seperti yang diharapkan.[9] Selain itu, produktivitas lulusan, yaitu perbandingan antara jumlah lulusan dan jumlah mahasiswa, belum memuaskan, terutama untuk program S1 di perguruan tinggi negeri (PTN) di mana terlihat adanya kecenderungan yang menurun. Meskipun banyak faktor yang berpengaruh, misalnya faktor mahasiswa itu sendiri, fakta tersebut merupakan salah satu indikasi adanya pencapaian mutu yang rendah pada sistim pendidikan tinggi.

Pada dasarnya pola pelaksanaan dari MMT difokuskan pada beberapa aspek. Menurut Jerome S. Arcaro aspek-aspek tersebut meliputi beberapa hal antara lain adalah focus pada kostumer, keterlibatan total, pengukuran, komitmen dan perbaikan yang berkelanjutan. [10] Seperti digambarkan dalam bahasan di bawah ini.

1. Fokus pada kostumer

Dalam lembaga pendidikan yang menerapkan MMT, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan lembaga adalah kostumer dan pemasok sekaligus. Secara khusus kostumer lembaga adalah peserta didik dan keluarganya.[11]

Lebih jelasnya kostumer di bagi dalam dua hal yaitu kostumer internal yang terdiri dari peserta didik, pendidik dan staf karyawan. Kostumer eksternal terdiri dari orang tua, masyarakat, pemerintah.[12]

2. Keterlibatan total

Setiap orang memiliki kewajiban berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dari pejaga mutu saja tetapi tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut setiap orang memberi kontribusi bagi upaya perbaikan mutu.

3. Pengukuran

Pengukuran adalah aspek yang rumit dalam pelaksanaan MMT, lembaga tidak dinilai bermutu apabila tidak memiliki parameter yang jelas dalam kendali mutu.

#### 4. Komitmen

Setiap orang harus memiliki komitmen dalam pengupayaan mutu, tidak hanya dewan pengendali mutu saja, namun semua pihak memiliki kewajiban dan komitemn dalam proses transformasi mutu.

#### 5. Perbaikan yang berkelanjutan

Supaya proses transformasi mutu berjalan dengan baik perlu melakukan proses yang sistematis dalam perbaikan yang berkesinambungan. Konsep yang berlaku adalah konsep PDCA perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan koreksi hasil.[13]

Tujuan manajemen pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan secara umum. Sebab, manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Jadi apapun jenis manajemen yang pakai pada dasarnya bertujuan pada proses pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Azd-Dzariyat: 56 yang berbunyi : ...Apabila dikaitkan dengan manajemen pendidikan, maka tujuan manajemen pendidikan adalah agar segala usaha kerjasama dengan mendayagunakan berbagai sumber (manusia dan non manusia) dapat berjalan secara teratur untuk mencapai tujuan pendidikan.[14]

### C. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan :

Keberlangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi hanyalah dapat di capai dengan melaksanakan planning, actuating, controlling. Dengan melaksanakan skema managerial sederhana ini dapat dipastikan kinerja sebuah organisasi akan selalu terukur.

Proses pengukuran diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan utama dalam mengambil dan melakukan sebuah kebijakan. Tidak terkecuali dalam organisasi pendidikan. Pola mangerial inipun juga harus dilakukan, karena pendidikan mengharapkan adanya keberhasilan dalam proses yang dilakukannya.

Keberhasilan dalam sebuah proses produksi tidak dapat dilepaskan dari pola penjaminan produk. Dalam teori manajemen, disebut dengan konsep penjaminan mutu. Dalam aplikasihnya dunia pendidikan juga melaksanakan penjaminan mutu yang dimulai dari

sektor recruitment (input), yang selanjutnya dilakukan pelakuan-perlakuan khusus (process ), sehingga hasilnya dapat maksimal (output). Inilah praktik penggunaan konsep total quality management dan total quality assurance dalam pendidikan yang juga di adopsi dalam dunia pendidikan.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Tafsir. 2005. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja . Rosdakarya.
- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama.2002. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Toha Putra
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Drajat, Zakiyah. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ekroman, Sri Soejatminah. *Quality Assurance Dalam Sistem Pendidikan Tinggi*.  
[http://www.pdk.go.id/Jurnal/34/quality\\_assurance\\_dalam\\_sistim\\_dikti](http://www.pdk.go.id/Jurnal/34/quality_assurance_dalam_sistim_dikti).
- Kasiram, Moh. *Konsep Dasar Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, KJM (Kantor Jaminan Mutu) UIN Malang*. [http://www.uin\\_malang.ac.id/KJM.htm](http://www.uin_malang.ac.id/KJM.htm)
- M. Echols, John & Sadily, Hasan. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Margono, 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mulyasa, Enco. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: suatu panduan praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin dan Abd. Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik Dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model Dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo.
- Pedoman Pendidikan UIN Malang Tahun Akademik 2007/2008. 2007. Malang : UIN Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standart Nasional Pendidikan*, 2005. Bandung: Fokusmedia.

- Sallis, Edward. 2006. *Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta : Ircisod.
- Sudiyono, Triyo Supriyatno, Moh. Padil. 2006. *Strategi Pembelajaran Partisipatori Di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Press.
- Sudjana, Nana.2008. *Dasar – Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suyudi. 2005. *Pendidikan Dalam Prespektif Al Qur'an: Integrasi Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani*. Yogyakarta : Mikraj.
- Syah, Muhibin. 2004. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, dkk. 2006. *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah: konsep, prinsip dan instrumen*. Bandung: Rafika Aditama.
- Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Sebuah Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Untuk Peningkatan Mutu*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 2005. Bandung : Fokusmedia.
- UUD 1945, 2003. Sinar Grafika. Jakarta.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- 
- [1] UUD 1945. (Jakarta:Sinar Grafika. 2003 ) cet.I hal: 14
- [2] Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan* ( Yogyakarta: LKiS. 2005 ) hal71
- [3] John M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia. 1996) hlm. 460.
- [4] Jerome S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 )Hal: 7
- [5] *Ibid* hal: 6
- [6] *Ibid*, hal: 7
- [7] *Ibid* hal : 8
- [8] Husaini Usman, *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2006) hal: 458
- [9] Dirjen Dikti, 2000, Hal :. 28
- [10] Jerome S Arcaro. *Op.cit* Hal: 39
- [11] *Ibid*. hal : 39
- [12] Husaini Usman, *Op.Cithal*: 463

[13] *Ibid* hal: 464

[14] Zakiyah Drajat. *Ilmu Pendidikan Islam*. ( Jakarta : Bumi Aksara.  
1996 ) Hal : 2